



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

Jalan Melur No 31 Singaraja

☎ : (0362) 32143 📷 : dagperinkopukm_buleleng

🌐 : disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmatnya dan Karunianya sehingga laporan ini dapat terselesaikan sesuai rencana. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Kinerja Aparatur menuju *Good Governance* dengan mengacu pada RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

LKjIP Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja, dimana setiap unit organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi Pemerintahan Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian

dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2023, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng membuat Dokumen LKjIP ini sebagai salah satu bentuk dari tanggungjawab organisasai yang akuntabel dan transparan.

Diharapkan Dokumen LKjIP Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng untuk dapat meningkatkan kinerjanya masing-masing yang akan datang.

Singaraja, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19741014 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii-iii
DAFTAR ISI.....	iv-v
DAFTAR TABEL.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii-viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1-2
1.2 Dasar Hukum.....	3-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	4-5
1.5 Isu Strategis.....	5
1.6 Struktur Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1 Rencana Startegis Perangkat Daerah	7-23
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	23-25
2.3 Perjanjian Kinerja.....	25-33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	35
3.1.1 Rumus yang digunakan.....	35

3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	38
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	38
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	41
3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	132
BAB IV PENUTUP	115
4.1 Simpulan	115
4.2 Langkah Perbaikan ke Depan	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan Dinas.....	11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas.....	12
Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas.....	16
Tabel 2.4 Program Penunjang Dinas.....	21
Tabel 2.5 IKU Daerah Kabupaten Buleleng Periode 2023-2026.....	24
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas dan Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP).....	28
Tabel 3.1 Rumus pengukuran kinerja.....	36
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas.....	39
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	42
Tabel 3.4 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1.....	43
Tabel 3.5 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategi 1.....	52
Tabel 3.6 Capaian Kinerja pada Sasaran Strategi 2.....	76
Tabel 3.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	77
Tabel 3.8 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategi 2.....	79
Tabel 3.9 Capaian Kinerja pada Sasaran Strategi 3.....	84
Tabel 3.10 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	84
Tabel 3.11 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategi 3.....	91

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebagai implementasi system akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan perencanaan strategis, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada public pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta fungsi pengawasan public terhadap jalannya pemerintahan.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan dengan program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2023 telah dapat

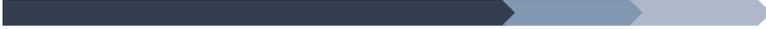
direalisasikan dengan Sangat Baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Dinas dan staf Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng disamping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait.

2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan Sangat Baik.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 pada tahun berikutnya akan berusaha meningkatkan kinerja, berupaya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat. Hal ini menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi, akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan, sebagai upaya dalam rangka mewujudkan *good governance* dan kebijakan pemerintah pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

LKjIP disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam dokumen LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RENSTRA SKPD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian

kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan kinerja Tahun 2021 yaitu tahun ketiga Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 –2022.

Salah satu tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan didalam urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Dengan demikian sebagai Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng wajib untuk menyampaikan dokumen LKjIP sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai perwujudan kewajiban dari Instansi Pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pada Penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan gambaran secara spesifik pelaksanaan perencanaan pengawasan dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektivitas fungsi perencanaan yang dijalankan Dinas Koperasi, UKM dan

Perdagangan. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah, sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2023 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada tahun yang akan datang

1.4 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Sasaran dan Program Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan melalui proses pembangunan 5 (lima) tahunan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan serta daya saing daerah.

Pembangunan di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng diarahkan untuk pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah menjadi pelaku Ekonomi yang Tangguh, Mandiri dan Profesional yang

bertumpu pada Pemberdayaan Sumber Daya sebagai pilar Ekonomi Kerakyatan dengan mekanisme pasar sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi, Usaha Kecil Menengah dalam menunjang kelangsungan usahanya serta sektor perdagangan yang mampu berdaya saing untuk meningkatkan nilai ekspor baik berupa olahan maupun perdagangan dan perindustrian sebagai menunjang komponen PDRB Kabupaten Buleleng berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha yang menjadi sumber pendapatan Daerah.

1.5 ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah instansi bergantung sejauh mana instansi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing sektor perdagangan dan perindustrian terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Masih rendahnya kemandirian daya saing Koperasi dan UMKM

1.6 STRUKTUR ORGANISASI

Bagan susunan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah membuat dan menetapkan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian tersebut merupakan wujud komitmen penerima amanah serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Kinerja yang telah disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Buleleng. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 – 2026 ditetapkan dengan Penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.

Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.

2.1.1 Pernyataan Visi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta para pemangku kepentingan maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2023 - 2026, Pemerintah Daerah mencanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

**“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya
Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. Mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada

pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24,25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali.

Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu. Secara harafiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, parahyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan palemahan yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diwujudkan dengan melaksanakan lima Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng berikut.

2.1.2 Pernyataan Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Buleleng “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana” merupakan kondisi yang ingin dicapai tahun 2025. Untuk mencapainya dilaksanakan misi berikut secara bertahap.

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia

yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Misi 3 : Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Misi 4 : Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

2.1.3 Tujuan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Mengacu pada RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

Misi Kepala Daerah	Tujuan SKPD
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Unggul dan Kompetitif 2. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang sejahtera 3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat 4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan jaman dan lingkungan global 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 	<p>Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing</p>

2.1.4 Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi Program/Kegiatan. Adapun tujuan beserta uraian Sasaran dan Indikator sasaran Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026

No	Tujuan SKPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Per Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%
			2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	78,14%	78,59%	79,09%	79,64%
			3	Persentase UMKM Formal	20%	21%	22%	23%
			4	Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%
			5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	79,00%	79,50%	80,00%
			6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	83%	84%	85%
			7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	100%	100%

		Stabilisasi harga bahan pokok penting	1	Laju inflasi	2.5-3.5%	2.5-3.5%	2.5-3.5%	2.5-3.5%
			2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01%	80,01%	80,01%	80,01%

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BULELENG
PERIODE 2023 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran RPD	Strategi	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran SKPD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	Meningkatkan kemudahan berinvestasi	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%
			Meningkatkan sebaran industri pengolahan		Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	78,14%	78,59%	79,09%	79,64%
			Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM		Persentase UMKM Formal	20%	21%	22%	23%
					Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%
			Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	79,00%	79,50%	80,00%
			Mengembangkan dan menguatkan		Persentase Sarana Distribusi	82%	83%	84%	85%

LKjIP Disdagperinkopukm Tahun 2023

			kelompok pedagang/usaha informal		Perdagangan Yang Berkualitas				
					Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	100%	100%
		Stabilisasi harga bahan pokok penting	Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting	Stabilisasi harga bahan pokok penting	Laju inflasi	2.5-3.5%	2.5-3.5%	2.5-3.5%	2.5-3.5%
					Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%	100%	100%
				Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01%	80,01%	80,01%	80,01%

2.1.5 Program dalam Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, kebijakan pada Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diarahkan pada (1) Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal; (2) Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industry; (3) Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM dan Koperasi. Adapun program yang mendukung pelaksanaan pada urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam,	Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengawasan	Pemeriksaan dan	Pengawasan Kekuatan,

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	dan Pemeriksaan Koperasi	Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Kabupaten/Kota	Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<p>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p> <p>Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro</p> <p>Fasilitasi Kemeduhan Perizinan Usaha Mikro</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</p> <p>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan</p>
7	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasarana, SDM serta Desain dan Teknologi
8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan,	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Kindkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
11	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
12	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
13	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri,	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat
14	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha secara Terintegritas berbasis Elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

2.1.6 Program Penunjang

Program ini dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan dari program prioritas atau program wajib yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 Kabupaten Buleleng. Adapun program tersebut, antara lain :

**Tabel 2.4 Program Penunjang Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Buleleng
Tahun 2023**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng Periode 2023 – 2026**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama		Target	Formulasi/Cara Pengukuran
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	$Gt = ((PBDt - PBDt-1) / PBDt-1) \times 100\%$
		2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	78,14%	$\frac{PI(t) - PI(t-1)}{PI(t-1)} \times 100\%$
		3	Persentase UMKM Formal	20%	Jumlah UMKM formal tahun ini dibagi jumlah total UMKM x 100%
		4	Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	Jumlah UMKM Naik Kelas tahun ini dibagi jumlah total

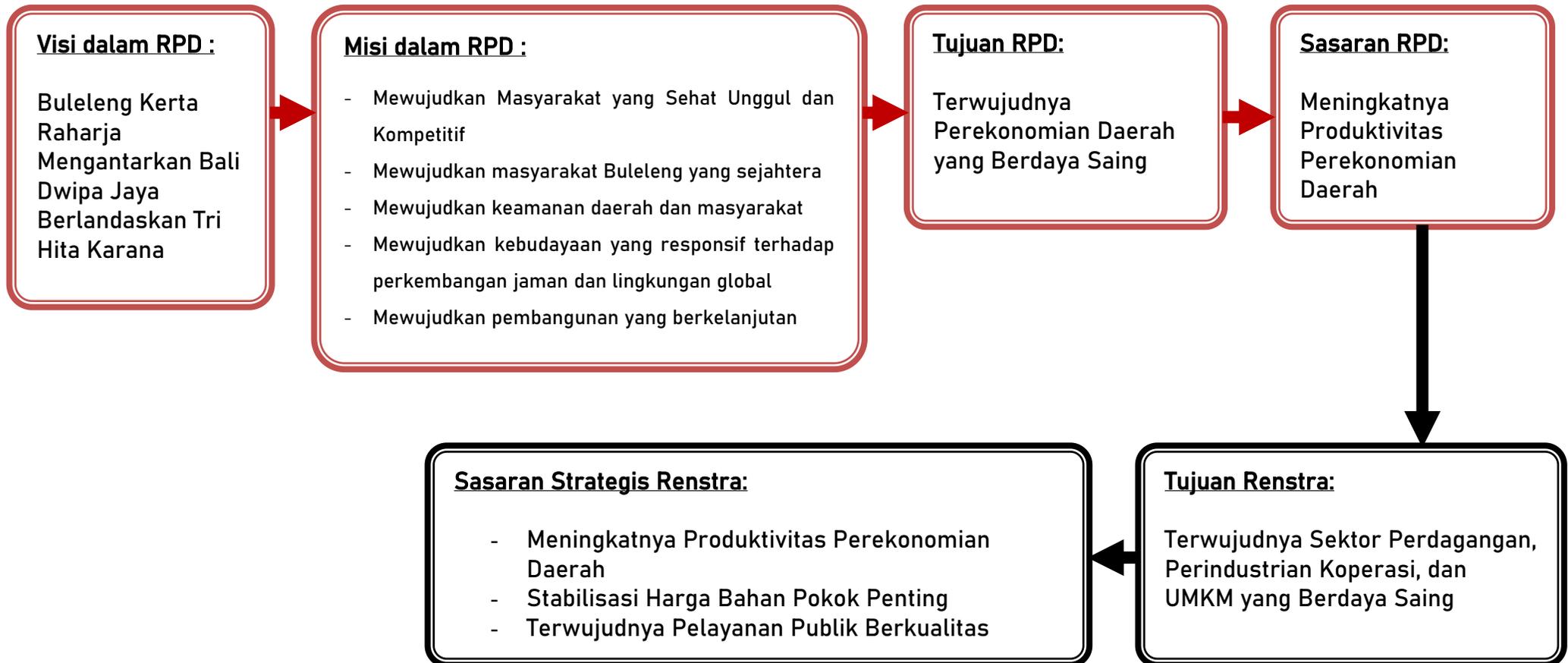
					UMKM x 100%
		5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	Jumlah koperasi aktif dan sehat tahun ini dibagi jumlah total koperasi x 100%
		6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	Jumlah sarpras dengan kondisi baik dibagi jumlah total pasar
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi produk unggulan dibagi jumlah UMKM x 100%
2	Stabilisasi harga bahan pokok penting	1	Laju inflasi	2.5-3.5%	Laju Inflasi (LI) = (IHK bulan ini - IHK bulan sebelumnya) / (IHK bulan sebelumnya x 100%)
		2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	Laporan harga bapokting
3	Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01%	$IKM = \frac{\text{Total nilai Nilai Persepsi per Unsar}}{\text{Total unsar yang terisi}} \times \text{Nilai Peringkat}$

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 mengacu pada Dokumen RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, Dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng 2023-2026. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2023. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026. Selanjutnya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan dan sasaran Renstra yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Berikut Penjabaran misi Kepala Daerah dalam Tujuan dan Sasaran RPD serta penjabarannya dalam Tujuan, dan Sasaran Renstra, sebagai berikut :

Bagan 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP)
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng Tahun 2023**

- **Perjanjian Kinerja (PK) Induk**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Program	Anggaran	Keterangan
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3,3%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	129.283.250	APBD
		2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	78,14%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	333.349.681	APBD
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	68.855.000	APBD
		3	Persentase UMKM Formal	20%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	427.117.070	APBD

					(UMKM)		
		4	Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	Program Pengembangan UMKM	577.771.012	APBD
		5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,5%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67.124.579	APBD
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	59.000.000	APBD
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	274.170.000	APBD
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	77.400.000	APBD
		6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	106.253.750	APBD
					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	364.302.552	APBD
					Program Perizinan dan	78.109.408	APBD

					Pendaftaran Perusahaan		
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	303.703.270	APBD
2	Stabilisasi harga bahan pokok penting	1	Laju inflasi	2.5-3.5%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	169.375.000	APBD
		2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%			
3	Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.053.453.332	APBD
TOTAL						13.089.267.904	

- **Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran	Keterangan	
1	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3,3%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	119.383.250	APBDP
		2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	78,14%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	843.266.731	APBDP
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	68.855.000	APBDP	
		3	Persentase UMKM Formal	20%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	443.963.160	APBDP
		4	Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	Program Pengembangan UMKM	1.022.077.777	APBDP
		5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,5%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67.124.579	APBDP
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	59.000.000	APBDP	

					Koperasi		
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	280.665.065	APBDP
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	77.400.000	APBDP
		6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	592.308.454	APBDP
					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	349.760.425	APBDP
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	63.317.703	APBDP
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	167.866.310	APBDP
2	Stabilisasi harga bahan pokok penting	1	Laju inflasi	2.5-3.5%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	270.054.500	APBDP
		2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%			
3	Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.627.340.537	APBDP

TOTAL	14.052.383.491	APBDP
--------------	-----------------------	--------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang dibuat sesuai ketentuan yang Buleleng diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas

Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, seluruh jajaran Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Penilaiannya mencangkup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan.

3.1.1 Rumus yang digunakan

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur keberhasilan indikator kinerja utama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumus Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama		Target	Formulasi/Cara Pengukuran
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%	$Gt = ((PBDt - PBDt-1) / PBDt-1)) \times 100\%$
		2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	78,14%	$\frac{PI(t) - PI(t-1)}{PI(t-1)} \times 100\%$
		3	Persentase UMKM Formal	20%	Jumlah UMKM formal tahun ini dibagi jumlah total UMKM x 100%
		4	Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	Jumlah UMKM Naik Kelas tahun ini dibagi jumlah total UMKM x 100%
		5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	Jumlah koperasi aktif dan sehat tahun ini dibagi jumlah total koperasi x 100%
		6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	Jumlah sarpras dengan kondisi baik dibagi jumlah total pasar
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi produk unggulan dibagi jumlah UMKM x 100%
2	Stabilisasi harga bahan pokok penting	1	Laju inflasi	2.5-3.5%	Laju Inflasi (LI) = (IHK bulan ini - IHK bulan sebelumnya) / (IHK bulan sebelumnya) x 100%
		2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	Harga bapokting

3	Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01%	$IKM = \frac{\text{Total nilai Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsiure yang term}} \times \text{Nilai Perimbangan}$
---	--	---	----------------------------------	--------	--

3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

85% s/d 100%	:	Sangat Berhasil
70% s/d 84%	:	Berhasil
55% s/d 69%	:	Cukup Berhasil
<55%	:	Tidak Berhasil

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini berdasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%	Predikat	Kode
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1 Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%			Data ini tersedia pada bulan Februari 2024 sesuai dengan data yang diberikan oleh BPS	
		2 Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	78.14%	78.14%	100%	Sangat Berhasil	
		3 Persentase UMKM Formal	20%	20%	100%	Sangat Berhasil	
		4 Persentase UMKM Naik Kelas	1.6%	1,6%	100%	Sangat Berhasil	
		5 Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78.50%	80.48%	102.52 %	Sangat Berhasil	
		6 Persentase Sarana Distribusi	82%	57.97%	70.70%	Tidak Berhasil	

			Perdagangan yang Berkualitas					
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	100%	Sangat Berhasil	
2	Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting	1	Laju inflasi	2.5-3.5%			Data ini tersedia pada bulan Februari 2024 sesuai dengan data yang diberikan oleh BPS	
		2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	100%	100%	Sangat Berhasil	
3	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01%	%	%	Sangat Berhasil	

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan uraian Visi, Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memiliki 1 Tujuan, 3 Sasaran Strategis, dan 10 Indikator Sasaran Strategis.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Adapun hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah

Pada Sasaran Strategis ini memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang telah terukur dengan rumus atau formula tertentu. Tingkat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1 akan diuraikan, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%		
		2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	78,14%	78,14%	100%
		3	Persentase UMKM Formal	20%	20%	100%
		4	Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	1,6%	100%
		5	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	78,50%	80,48%	102,52%
		6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	57.97%	70.70%
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	100%

Tabel 3.4 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan ekonomi daerah	3.3%			-		
		2	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	78,14 %	78,14%	100%	- Meningkatnya investasi, karena semakin tinggi tingkat investasi maka akan memperbesar modal yang digunakan dalam proses produksi. Maka kenaikan investasi akan	- Struktur industry masih belum kuat. Ini terbukti dari ketergantungan industri dalam negeri terhadap terhadap impor baik bahan baku maupun barang modal masih tinggi - Belum optimalnya	- Memperbaiki struktur industry menjadi lebih kuat, seperti menggunakan bahan baku/sumber daya alam yang ada di dalam negeri

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							<p>meingkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja.</p> <p>- Meningkatnya jumlah unit usaha. Jumlah unit usaha merupakan jumlah perusahaan industry pengolahan yang beroperasi, yang</p>	<p>pemanfaatan sumber daya alam yang pada satu sisi justru memiliki keunggulan komparatif</p> <p>- Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produk dan modal,</p>	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							dihitung dalam satuan unit usaha. Secara umum pertumbuhan unit usaha suatu sector pada suatu daerah akan menambah kontribusi terhadap PDRB.		
		3	Persentase UMKM Formal	20%	20%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesadaran pelaku UMKM dalam hal kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya pelaku UMKM yang belum paham mengenai perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Kurangnya inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan berkelanjutan melalui kolaborasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							<p>motivasi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kolaborasi program dalam pemberdayaan dan pengembangan (usaha UMKM) 	<p>untuk mengembangkan produk turunan dari potensi sumber daya alam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kemampuan dalam menjangkau akses pasar secara digital 	<p>program dengan pihak terkait untuk mengembangkan usaha UMKM baik dari sisi legalitas, produktivitas dan kualitas produk, kemasan dan pemasaran</p>
		4	Persentase UMKM Naik Kelas	1,6%	1,6%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi yang memberikan kesempatan dan mendukung perkembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kualitas SDM pelaku UMKM dalam mengakses informasi dan pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan serta

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							<p>usaha UMKM</p> <p>- Kegiatan-kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, produksi, peningkatan kualitas produk, kemasan, branding produk dan pemasaran baik secara konvensional maupun secara digital</p>	<p>teknologi</p> <p>- Masih kurangnya pelaku UMKM dalam hal pemasaran dan branding produk yang dimiliki, sehingga produk umkm kurang dikenal luas di pasaran</p>	<p>akses jaringan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga terkait</p>
		5	Persentase	78,50	80,48%	102,52%	- Pelaksanaan RAT	- Masih kurangnya	- Melaksanakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
			Koperasi Aktif dan Sehat	%			koperasi secara rutin dan tepat waktu	keterampilan SDM koperasi dalam hal penyusunan laporan keuangan mengenai ekonomi akuntansi dan manajemen resiko	sosialisasi, pendampingan dan bimbingan penyusunan laporan keuangan koperasi yang baik
		6	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	82%	57.97%	70.70%	- Adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan.	- Belum adanya program kegiatan pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan - Masih kurangnya kesadaran pengelola sarana perdagangan	- Meningkatkan pengawasan, sosialisasi serta pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan. - Mengajukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							terhadap pemeliharaan sarpras perdagangan yang ada	permohonan revitalisasi pasar guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih dan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
									tertata.
		7	Persentase Kemitraan UMKM	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan promosi produk unggulan daerah - Tingginya antusiasme pelaku UMKM dalam mengikuti promosi produk - Adanya kesadaran pelaku UMKM dalam memanfaatkan e-commerce untuk memasarkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya rasa kepercayaan usaha besar dalam menjalin kerjasama dengan pelaku UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan pelaksanaan promosi produk unggulan daerah untuk menarik usaha besar bermitra dengan pelaku UMKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							produknya lebih efisien dengan jangkauan global - Adanya peningkatan penggunaan produk dalam negeri/produk lokal		

**Tabel 3.5 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	% koperasi aktif dan sehat	78.50 %	80.48 %	102.52 %	119.383.250	115.546.738	96,79 %
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengalami peningkatan dari sisi kelembagaan dan usaha	12 lap	12 lap	100%	119.383.250	115.546.738	96,79 %
			- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,					119.383.250	115.546.738	96,79 %

			Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restruksi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	% pertumbuhan industry pengolahan pada PDRB	78.14 %	78.14 %	100%	843.266.731	664.467.286	78,80 %
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana	Jumlah laporan pembahasan	4 lap	4 lap	100%	843.266.731	664.467.286	78.80 %

			Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	draft Ranperda RPIK Buleleng						
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan - Pembangunan Sumber Daya Industri					691.070.548	520.967.936	75.40 %
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan - Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					152.196.183	143.499.350	94.30 %
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	% perijinan dan ketersediaan data IKM	82%	82%	100%	68.855.000	37.451.125	54.40 %

			Kabupaten/ Kota							
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IKUI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pemenuhan dokumen kelengkapan perijinan dan rekomendasi	12 lap	12 lap	100%	68.855.000	37.451.125	54.40 %
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen - perolehan IUI, IPUI, IKUI dan IPKI Kewenangan					68.855.000	37.451.125	54.40 %

			Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
		Persentase UMKM Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	% umkm formal	20%	20%	100%	443.963.160	427.500.046	96.30 %
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang	- Jumlah lap UMKM yang	2 lap 12	2 lap 12 lap	100%	443.963.160	375.602.138	96.30 %

			Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	terdata - Jumlah lap UMKM yang memiliki NIB - Jumlah lap pelaku UMKM yang bersertifikat	lap 4 lap	4 lap				
			- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					116.939.368	108.434.788	92.73 %
			- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro					88.664.990	88.162.550	99.43 %
			- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro					29.012.552	27.526.896	94.90 %
			- Koordinasi dan Sinkronisasi					73.346.250	73.233.812	99.90

			dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro							%
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan					136.000.000	130.142.000	95.70 %
		Persentase UMKM Naik Kelas	Program Pengembangan UMKM	% umkm naik kelas	1.6%	1.6%	100%	1.022.077.777	976.837.509	95.60 %
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala	Jumlah UMKM yang bermitra dengan lemabaga	2 lap	2 lap	100%	1.022.077.777	976.837.509	95.60 %

			Usaha Menjadi Usaha Kecil	keuangan dan lembaga bisnis lainnya						
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi					1.022.077.777	976.837.509	95.60 %
		Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	% koperasi yang diawasi dan diperiksa	36.76 %	36.76 %	100%	67.124.579	63.138.212	94.10 %
			Pemeriksaan dan	Jumlah kop yang	12	12 lap	100%	67.124.579	63.138.212	94.10

			Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	diawasi dan diperiksa	lap					%
			- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota					67.124.579	63.138.212	94.10 %
			Program Penilaian	% koperasi	6.1%	6.1%	100%	59.000.000	57.557.752	97.60

			Kesehatan KSP/USP Koperasi	simpan pinjam/unit simpan pinjam sehat						%
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	12 lap	12 lap	100%	59.000.000	57.557.752	97.60 %
			- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					59.000.000	57.557.752	97.60 %

			Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	% sumber daya manusia koperasi terlatih	100%	100%	100%	280.665.065	260.467.500	92.80 %
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus/pengaw as koperasi yang diklat	60 orang	60 orang	100%	280.665.065	260.467.500	92.80 %
			Peningkatan Pemahaman dan - Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas					280.665.065	260.467.500	92.80 %

			dan Kompetensi SDM Koperasi							
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	% usaha simpan pinjam berizin	1.9%	1.9%	100%	77.400.000	72.487.472	93.70 %
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	% koperasi yang memiliki Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam (SIUP)	69.04 %	69.04 %	100%	77.400.000	72.487.472	93.70 %
			- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang,					77.400.000	72.487.472	93.70 %

			Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	% sarana distribusi perdagangan yang berkualitas	82%	82%	100%	592.308.454	578.425.168	97.70 %
			Pembinaan Terhadap Pengelola	Jumlah laporan sarana distribusi	20 lap	20 lap	100%	592.308.454	578.425.168	97.70 %

			Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	pasar yang kondisi baik, sedang dan rusak						
			Pembinaan dan Pengendalian - Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					592.308.454	578.425.168	97.70 %
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	% UTTP patuh tera ulang	82%	82%	100%	349.760.425	339.128.528	96.96 %
			Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	- Jumlah dok kebijakan pengamanan dan perlindungan konsumen	2 dok 12 12 lap 30	2 dok 12 lap 12 lap 30 dok	100%	349.760.425	339.128.528	96.96 %

				<p>yang sesuai dengan aturan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lap kesesuaian UTPP dan BDKT/B2 terhadap ketentuan yang berlaku - Jumlah lap pelaksanaan tera/tera ulang UTPP - Jumlah surat keterangan hasil pengujian 	dok						
			-	Pelaksanaan Metrologi Legal,					260.090.813	253.633.196	97.51 %

			Berupa Tera, Tera Ulang							
			Pengawasan/Pen- yuluhan Metrologi Legal					89.669.612	85.495.332	95.34 %
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	% pemenuhan perizinan perusahaan perdagangan	82%	82%	100%	63.317.703	62.850.022	99.26 %
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dok pemahaman dan fasilitasi tertib niaga	24 dok	24 dok	100%	63.317.703	62.850.022	99.26 %
			Fasilitasi - Penerbitan Tanda Daftar Gudang					63.317.703	62.850.022	99.26 %
		Persentase Kemitraan UMKM	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk	% kemitraan UMKM	100%	100%	100%	167.866.310	151.040.148	89.98 %

			Dalam Negeri							
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	- Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan - Jumlah promosi produk unggulan yang diselenggarakan	- 12 lap - 12 lap	- 12 lap - 12 lap	100%	167.866.310	151.040.148	89.98 %
			- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					167.866.310	151.040.148	89.98 %
TOTAL								4.154.998.454	3.806.897.506	91.62%

Foto kegiatan Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas
Perekonomian Daerah



FOTO KEGIATAN BID. PUM

Realisasi Kelembagaan Kegiatan ke-III dengan Tema
"Strategi Branding dan Pemasaran Digital Produk UMKM"



Penyerahan Sertifikat dan Penghargaan kepada
Peserta dan Panitia Kegiatan Pelatihan dan
Pemasaran 2023



Business Development Service dengan Tema
"PROMOSI CERDAS DI ERA TANPA BATAS"



PROGRAM GANESHA DIGITAL
ENTREPRENEURSHIP ACADEMY (GDEA)
TAHUN 2023



Realisasi Kelembagaan Kegiatan ke-III dengan Tema
"Strategi Branding dan Pemasaran Digital Produk UMKM"

FOTO KEGIATAN BID. INDUSTRI



FOTO KEGIATAN UPTD METROLOGI LEGAL

Pelayanan Tera/Tera Ulang (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) di Pertashop di kawasan Anyerung, Pertashop Dika Alauangul dan Pertashop Desa Rukh



Pelayanan Tera/Tera Ulang (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang berlokasi di Pasar Pekarahan



UPTD (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) di Pertashop Desa Temukuh, Pertashop Desa Tukad Marga dan Pertashop Desa Sembangan



Pengawasan Pengalihan BMM di 3 SDN di Wilayah Kelurahan Kalereng



Pelayanan Tera/Tera Ulang
UPTD (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya)
yang berlokasi di Pasar Anyar Singaraja



Rabu, 15 November 2023

FOTO KEGIATAN BID. STNP

FOTO KEGIATAN BID. STNP

Tinjauan Minuman Beralkohol

PT. ALAM MUNDUK LESTARI



PT. ADI JAYA SANTOSO



PT. POINCIANA



3.3.2 Sasaran Strategis 2 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting

Pada Sasaran Strategis ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang telah terukur dengan rumus atau formula tertentu. Tingkat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2 akan diuraikan, sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting	- Laju Inflasi	2.5-3.5%		
		- Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Penting	100%	100%	100%

Tabel 3.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting	1	Laju Inflasi	2.5-3.5%			<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya monev ke lapangan terkait ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga akibat pendistribusian yang tidak berjalan secara efektif dan efisien - Terlaksananya OPM (Operasi Pasar Murah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya permintaan barang dan jasa yang melebihi pasokan yang tersedia, sehingga harga cenderung naik - Biaya produksi yang meningkat, seperti upah pekerja, harga bahan baku atau biaya produksi lainnya meningkat, 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemantauan ke lapangan sehingga pemerintah dapat mengatur harga komoditas penting yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. Hal ini dapat dilakukan melalui intervensi pasar,
		2	Persentase Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting	100%	100%	100%			

							<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan 	<p>sehingga produsen menaikkan harga untuk mempertahankan margin keuntungan</p>	<p>pengelola stok, dan kebijakan impor untuk menjaga stabilitas harga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan OPM (Operasi Pasar Murah) di Kabupaten Buleleng
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

**Tabel 3.8 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 2 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting	Laju Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laju inflasi	2.5%-3.5%			118.679.500	21.270.870	17.92%
			Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tngkat pasar kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sub distributor stok barang kebutuhan pokok dan barang penting - Jumlah operasi pasar dan/atau pasar murah 	12 lap 10 lap	12 lap 10 lap	100%	118.679.500	21.270.870	17.92%
			- Pemantauan harga dan stok barang					118.679.500	21.270.870	17.92%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
				kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu (1) kabupaten/kota						
		Persentase Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Penting	100%	100%	100%	151.375.000	150.490.816	99.41%
			Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota	- Jumlah monev/pemantauan ketersediaan barang, pasokan barang, harga	12 lap	12 lap	100%	151.375.000	150.490.816	99.41%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
				barang pokok dan penting yang sesuai ketentuan						
			Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang							
			- kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat				151.375.000	150.490.816	99.41%	
TOTAL								270.054.500	171.761.686	63.60%

Foto Kegiatan Sasaran Strategis 2 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting



PEMANTAUAN HARGA BAPOKTING



INFORMASI HARGA RATA - RATA BARANG POKOK
DI PASAR ANYAR DAN PASAR BANYUASRI
SENIN, 20 NOVEMBER 2022

INFORMASI HARGA RATA - RATA
BARANG POKOK
DI PASAR ANYAR DAN PASAR
BANYUASRI
RABU, 22 NOVEMBER 2023



3.3.3 Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas

Pada Sasaran Strategis ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yang telah terukur dengan atau formula tertentu. Tingkat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3 akan diuraikan, sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.01%	85.47%	106.82%

Tabel 3.10 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.01%	85.47%	106.82%	- Adanya kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan	- Masih kurangnya informasi produk pelayanan yang terdapat di Dinas	- Meningkatkan pemberian pemahaman kepada masyarakat/ pengguna layanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
						<ul style="list-style-type: none"> - Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; - Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; - Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan 	<p>Perdagangan, Perindustrian dan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng</p> <p>- Masyarakat cenderung memberikan respon yang normative ketika mengisi kuesioner</p>	<p>oleh petugas pelayanan public terkait setiap pelayanan yang ada pada Dinas</p> <p>- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan unsur-unsur pelayanan yang</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
						<p>yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; - Keadilan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; - Kesopanan petugas pelayanan, yaitu sikap dan 		<p>sudah dikategorikan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan upaya kemudahan pelanggan dalam mendapatkan informasi mengajukan keluhan dengan adanya operator pelayanan publik.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
						<p>perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; - Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; 		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
						<ul style="list-style-type: none"> - Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; - Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih , rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; - Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian			
						penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.		

**Tabel 3.11 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.01%	85.47%	106.82%	9.627.340.537	9.266.893.551	96.30%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban tepat waktu - Nilai AKIP yang baik	16 dok 68.30%	16 dok 68.30%	100%	496.951.897	423.984.336	85.32%
			- Penyusunan					309.730.949	246.396.436	79.55%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					187.220.948	177.587.900	94.85%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai	12 lap	12 lap	100%	7.214.002.294	7.164.376.602	99.31%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
				ketentuan						
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.021.603.556	6.978.405.946	96.54%
			- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					192.398.738	185.970.656	96.65%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	12 lap	12 lap	100%	3.584.000	2.536.522	70.77%
			- Pendidikan dan					3.584.000	2.536.622	70.77%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
				pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah laporan Tata Kelola Administrasi Perkantoran - Jumlah laporan pelayanan publik	12 lap 12 lap	12 lap 12 lap	100%	379.273.825	317.994.403	83.84%
			Penyediaan Komponen	- Instalasi Listrik/penerangan Bangunan				59.437.775	55.446.933	93.30%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
				Kantor						
			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				92.191.050	79.204.050	85.91%
			-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				129.629.700	105.894.000	81.70%
			-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.179.500	7.179.000	100%
			-	Fasilitas Kunjungan Tamu				25.437.800	22.210.300	87.31%
			-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				65.398.000	48.059.620	73.50%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Konsultasi SKPD							
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	12 lap	12 lap	100%	1.181.475.784	1.054.488.031	89.25%
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat					303.018.631	300.843.516	99.30%
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					310.760.000	214.910.797	69.20%
			- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan					255.259.200	250.546.450	98.15%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Kantor							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					312.437.953	288.187.268	92.24%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	12 lap	12 lap	100%	352.052.737	303.513.657	86.21%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional					208.791.065	170.270.928	81.55%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			atau Lapangan							
			- Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya					113.811.672	105.666.736	92.84%
			- Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan kantor					29.450.000	27.566.993	93.61%
TOTAL								9.627.340.537	9.266.893.551	96.30%

3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efisiensi

3.4.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	BELANJA OPERASI	12.875.271.341	12.121.808.493	94.15%
	- Belanja Pegawai	7.021.603.556	6.978.405.946	93.38%
	- Belanja Barang dan Jasa	5.758.667.785	5.048.402.547	87.66%
	- Belanja Hibah	95.000.000	95.000.000	100%
2	BELANJA MODAL	1.177.112.150	1.123.744.250	95.50%
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	959.117.150	908.413.050	94.71%
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.000.000	215.331.200	98.80%
TOTAL		14.052.383.491	13.245.552.743	94.30%

3.4.2 Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.627.340.537	9.266.893.551	96.30%	80.01%	85.47%	106.82%	Efisiensi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	496.951.897	423.984.336	85.32%	16 dok 68.30 %	16 dok 68.30%	100%	Efisiensi
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	309.730.949	246.396.436	79.55%				
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	187.220.948	177.587.900	94.85%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Kinerja SKPD							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.214.002.294	7.164.376.602	99.31%	12 lap	12 lap	100%	Efisiensi
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.021.603.556	6.978.405.946	93.40%				
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.398.738	185.970.656	96.70%				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.584.000	2.536.522	70.77%	12 lap	12 lap	100%	Efisiensi
1	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3.584.000	2.536.522	70.77%	12 lap	12 lap	100%	Efisiensi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.273.825	317.994.403	83.84%	12 lap 12 lap	12 lap 12 lap	100%	Efisiensi
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	59.437.775	55.446.933	93.30%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.191.050	79.204.050	85.91%				
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.629.700	105.894.000	81.70%				
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.179.500	7.179.500	100%				
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.437.800	22.210.300	87.31%				
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.398.000	48.059.620	73.50%			100%	Efisiensi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.181.475.784	1.054.488.031	89.30%	12 lap	12 lap	100%	Efisiensi
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	303.018.631	300.843.516	99.30%				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.760.000	214.910.797	69.20%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.259.200	250.546.450	98.15%				
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.437.953	288.187.268	92.23%				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.052.737	303.513.657	86.21%	12 lap	12 lap	100%	Efisiensi
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.791.065	170.279.928	81.55%				
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	113.811.672	105.666.736	92.84%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan kantor	29.450.000	27.566.993	93.60%				
B	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	77.400.000	72.487.472	93.65%	1.9%	1.9%	100%	Efisiensi
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.400.000	72.487.472	93.65%	69.04%	69.04%	100%	Efisiensi
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	77.400.000	72.487.472	93.65%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
C	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	67.124.579	63.138.212	94.06%	36.76%	36.76%	100%	Efisiensi
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	67.124.579	63.138.212	94.06%	12 lap	12 lap	100%	Efisiensi
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	67.124.579	63.138.212	94.06%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Kabupaten/ Kota							
D	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	59.000.000	57.557.752	97.55%	6.1%	6.1%	100%	Efisiensi
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.000.000	57.557.752	97.55%				
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59.000.000	57.557.752	97.55%				
E	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	280.665.065	260.467.500	92.80%	100%	100%	100%	Efisiensi
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah	280.665.065	260.467.500	92.80%	60 orang	60 orang	100%	Efisiensi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	280.665.065	260.467.500	92.80%				
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	119.383.250	115.546.738	96.80%	78.50%	80.48%	102.52%	Efisiensi
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	119.383.250	115.546.738	96.80%	12 lap	12 lap	100%	Efisiensi
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai	119.383.250	115.546.738	96.80%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
G	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	443.963.160	427.500.046	96.30%	20%	20%	100%	Efisiensi
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	443.963.160	427.500.046	96.30%	2 lap 12 lap 4 lap	2 lap 12 lap 4 lap	100%	Efisiensi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	116.939.368	108.434.788	92.73%				
2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	88.664.990	88.162.550	99.43%				
3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	29.012.552	27.526.896	94.90%				
4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	73.346.250	73.233.812	99.90%				
5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas	136.000.000	130.142.000	95.70%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan							
H	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.022.077.777	976.837.500	95.57%	1.6%	1.6%	100%	Efisiensi
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.022.077.777	976.837.500	95.57%				
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.022.077.777	976.837.500	95.57%				
I	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	63.317.703	62.850.022	99.30%	82%	82%	100%	Efisiensi
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	63.317.703	62.850.022	99.30%	24 dok	24 dok	100%	Efisiensi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	63.317.703	62.850.022	99.30%				Efisiensi
J	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	592.308.454	578.425.168	97.70%	82%	82%	100%	Efisiensi
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	592.308.454	578.425.168	97.70%	20 lap	20 lap	100%	Efisiensi
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	592.308.454	578.425.168	97.70%				
K	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	270.054.500	171.761.686	63.60%	100%	100%	100%	Efisiensi
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	151.375.000	150.490.816	99.41%	12 lap	12 lap	100%	Efisiensi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	151.375.000	150.490.816	99.41%	100%	100%	100%	Efisiensi
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	118.679.500	21.270.870	17.92%	12 lap 10 lap	12 lap 10 lap	100%	Efisiensi
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	118.679.500	21.270.870	17.92%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
L	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	349.760.425	239.128.528	68.40%	82%	82%	100%	Efisiensi
	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	349.760.425	239.128.528	68.40%	2 dok 12 lap 12 lap 30 dok	2 dok 12 lap 12 lap 30 dok	100%	Efisiensi
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	260.090.813	153.633.196	59.10%				
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	89.669.612	85.495.332	95.34%				
M	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	167.866.310	151.040.148	89.98%	100%	100%	100%	Efisiensi
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	167.866.310	151.040.148	89.98%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan	
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	167.866.310	151.040.148	89.98%				
	N	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	843.266.731	664.467.286	78.80%	78.14%	78.14%	100%	Efisiensi
		Penyusunan dan Evaluasi Reencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	843.266.731	664.467.286	78.80%	4 lap	4 lap	100%	Efisiensi
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	691.070.548	520.967.936	75.40%				
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	152.196.183	143.499.350	94.30%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	dan Peran Serta Masyarakat							
O	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	68.855.000	37.451.125	54.40%	82%	82%	100%	Efisiensi
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	68.855.000	37.451.125	54.40%	12 lap	12 lap	100%	Efisiensi
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IKUI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi	68.855.000	37.451.125	54.40%				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			Fisik			Keterangan
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
TOTAL		14.052.383.491	13.245.552.743	94.30%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel diatas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dengan total pagu sebesar **Rp. 14.052.383.491**, realisasi anggaran sebesar **Rp. 13.245.552.743** atau **94.30%** dengan realisasi fisik **100%**. Hal ini dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dan realisasi fisik terjadi efisiensi sebesar **Rp. 806.830.748** atau **5.74%**.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja menuju *Good Governance* dengan mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Sebagai Instansi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan kewenangan dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023, secara umum sudah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

4.2 Langkah Perbaiki ke Depan

Pencapaian kinerja urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah menunjukkan perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik dalam urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah. Adapun permasalahan serta langkah/tindak lanjut yang harus diambil dalam pencapaian indikator dimasa mendatang antara lain :

No	Permasalahan	Tindak lanjut
1	Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan tertib niaga,	➤ Melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang, pendataan UTTP serta pembinaan dan

	sehingga masih sering terjadi pelanggaran dilapangan terutama dalam hal tertib ukur, penjualan produk illegal dan produk olahan makanan yang membahayakan kesehatan.	penyuluhan tertib niaga secara berkelanjutan. ➤ Melaksanakan pembinaan pedagang secara berkelanjutan.
2	Masih kurangnya pemahaman pelaku industry mengenai permohonan izin industry dan standar produk yang dihasilkan	Meningkatkan pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industry di masing-masing sentra industry yang ada di Kabupaten Buleleng
3	Masih kurangnya kreatifitas para pengrajin dalam pengolahan bahan maupun pengemasan produk	Meningkatkan pelaksanaan pelatihan-pelatihan kepada pengrajin
4	Masih kurangnya pemahaman pengurus koperasi mengenai tata cara permohonan NIB	Melaksanakan pendampingan secara berkala kepada masing-masing pengurus koperasi
5	Masih adanya koperasi yang belum terakses permodalannya dari LPDB, Perbankan, dan Lembaga keuangan lainnya	Melaksanakan fasilitasi akses permodalan melalui kegiatan temu mitra
6	Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai tata cara memperoleh NIB	Memberikan sosialisasi dan pendampingan secara berkala kepada pelaku usaha mengenai tata cara memperoleh NIB
7	Masih kurangnya kesadaran pengelola sarana perdagangan terhadap pemeliharaan sarpras	Meningkatkan pengawasan, sosialisasi serta pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan.

	perdagangan yang ada	
--	----------------------	--

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19741014 199311 1 001

